

## **Prosiding Paper Competition Accounting Festival**

---

### **EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN TERINTEGRASI SEKTOR PUBLIK**

**Annora Callista Ramadhani<sup>1</sup> Nova Dwi Setiyana<sup>2</sup> Rati Kumala Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan  
annoracallistaramadhani@gmail.com<sup>1</sup>

---

#### **ARTICLE INFO**

#### ***ABSTRACT (in English)***

##### ***Article history:***

*Received:*

*Received in revised form:*

*Accepted:*

***Keywords:*** *Document analysis, financial information system, integrated system, public sector, qualitative research, system evaluation*

##### ***Paper type***

Research article

This study evaluates the implementation of integrated financial information systems (IFIS) in the public sector, focusing on system effectiveness, user adaptation, and operational challenges. The research explores how these systems impact financial management processes and user productivity within public sector organizations. A qualitative methodology was employed, utilizing document analysis and user observation. Data collection involved reviewing system documentation, user manuals, implementation reports, and observing system users in their natural work environment. The research was conducted over six months, involving several public sector organizations. The findings highlight key patterns in the implementation and use of IFIS, including both technical and organizational challenges in system adoption, user adaptation, and the effect on financial reporting accuracy and efficiency. The analysis identifies factors contributing to successful implementation and barriers that hinder progress. These insights provide a deeper understanding of the practical challenges and benefits of IFIS in the public sector. The study offers actionable recommendations for improving systems and strategies, particularly valuable for public sector organizations considering digital transformation initiatives.

## **PENDAHULUAN**

Penerapan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi (SIKT) di sektor publik merupakan langkah strategis dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan Indonesia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sistem informasi keuangan berperan tidak hanya sebagai platform administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan negara (Bhatnagar & Sharma, 2021). Namun, realitas implementasi menunjukkan masih adanya tantangan signifikan terkait teknologi, regulasi, dan kesiapan kelembagaan, yang berdampak pada efektivitas sistem dalam mendukung kebijakan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan lain yang muncul adalah kesenjangan aksesibilitas dan literasi keuangan masyarakat, yang juga menjadi faktor utama dalam implementasi kebijakan sistem keuangan digital. Seperti dalam pengembangan penelitian dengan judul “*Green Financing in India: Identifying Future Scope for Innovation in Financial System*” yang diteliti oleh Sumedha Bhatnagar dan Dipti Sharma yang memfokuskan pada *green finance*, pendekatan yang bersifat *top-down* sering kali mengutamakan aspek regulasi dan birokrasi dibandingkan dengan perspektif serta kebutuhan pengguna akhir, sehingga menghambat partisipasi publik secara optimal. Selain itu, rendahnya penggunaan sistem oleh masyarakat dapat disebabkan oleh keterbatasan akses teknologi, kualitas informasi yang tersedia, serta minimnya insentif bagi pengguna untuk memanfaatkan sistem secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat agar sistem informasi keuangan dapat lebih inklusif serta responsif terhadap tantangan yang ada.

Peningkatan peringkat Indonesia dalam *UN E-Government Survey 2024* tidak terlepas dari semakin luasnya penetrasi internet yang telah mencapai 79,5% pada tahun 2024. Namun, kesenjangan digital masih menjadi tantangan signifikan dalam pemerataan akses *layanan e-government*. Nurul Fadilla (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan digital merupakan ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang disebabkan oleh faktor geografis, sosial ekonomi, usia, dan gender, yang pada akhirnya mempengaruhi kesetaraan dalam memperoleh informasi. Sementara itu, Ria Jayanthi dan Anggini Dinaseviani (2022) menyoroti bahwa peningkatan akses internet di Indonesia belum disertai dengan kesiapan digital masyarakatnya, termasuk dalam pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks implementasi sistem informasi publik, Tutut Dwi Prihatin dkk. (2023) menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk menilai faktor keberhasilan sistem pelayanan publik di Desa Tlagawera. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti dukungan infrastruktur, persepsi kemudahan penggunaan, serta kebijakan yang jelas, memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan dan pemanfaatan sistem informasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan inklusivitas layanan digital, strategi pemerintah tidak hanya harus berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi, tetapi juga meningkatkan literasi digital serta kesadaran masyarakat terhadap manfaat *e-government*.

Rumusan masalah penelitian mencakup empat kunci : (1) Bagaimana tingkat pengetahuan dan literasi masyarakat mengenai sistem informasi keuangan pemerintah? (2) Apa saja hambatan dan pengalaman masyarakat dalam mengakses sistem informasi keuangan? (3) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas, kemanfaatan, dan kredibilitas informasi yang disajikan? (4) Apa rekomendasi konkret dari masyarakat untuk mengembangkan sistem informasi keuangan yang lebih inklusif dan responsif? Tujuan penelitian ini dikaji yaitu untuk : (1) Melakukan pemetaan komprehensif tingkat pengetahuan dan literasi masyarakat tentang sistem informasi keuangan pemerintah, (2) Mengidentifikasi tantangan dan hambatan akses

yang dihadapi masyarakat, (3) Mengevaluasi persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi keuangan, serta (4) Merumuskan rekomendasi pengembangan sistem berbasis partisipasi publik.

Secara teoritis kontribusi penelitian ini akan memperkaya kajian akademis tentang transformasi digital dalam tata kelola sistem informasi keuangan pemerintahan. Signifikansi penelitian terletak pada potensinya untuk mendorong paradigma baru dalam pengelolaan keuangan publik, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis, dan berkontribusi pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

## **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk mengevaluasi sistem informasi keuangan terintegrasi di sektor publik. Metodologi penelitian dirancang untuk mengeksplorasi secara mendalam kompleksitas implementasi sistem, dengan mempertimbangkan keragaman pengalaman pengguna dari berbagai latar belakang demografis dan profesional. Dalam merancang kerangka metodologis, penelitian ini menggunakan tiga teori fundamental: *Technology Acceptance Model (TAM)*, *DeLone and McLean Information System Success Model*, dan *Change Management Theory*. Pendekatan teoritis ini memungkinkan analisis multidimensi terhadap sistem informasi, tidak hanya dari perspektif teknologi, tetapi juga dari aspek organisasional dan pengalaman pengguna.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis Penelitian ini mengintegrasikan tiga teori yang membantu memahami implementasi dan adopsi sistem informasi keuangan terintegrasi di sektor publik: (1) *Technology Acceptance Model* yang dikembangkan oleh Davis (1989) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pengguna sampai pada keputusan untuk menerima dan menggunakan teknologi baru. Model ini berfokus pada dua faktor utama yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi kemanfaatan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Dalam konteks sistem informasi keuangan pemerintah, *TAM* membantu memahami bagaimana persepsi masyarakat tentang manfaat transparansi keuangan mempengaruhi penggunaan sistem dan sejauh mana kemudahan penggunaan sistem mempengaruhi tingkat adopsi oleh berbagai kelompok pengguna. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan.

Teori kedua yaitu (2) *DeLone and McLean Information System Success Model* (2003) menyediakan kerangka komprehensif untuk mengevaluasi kesuksesan sistem informasi. Model ini mengidentifikasi enam dimensi kesuksesan yang saling terkait: kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Model ini penting karena menunjukkan bahwa kesuksesan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknisnya, tetapi juga oleh dampaknya terhadap pengguna dan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, *model DeLone and McLean* membantu menganalisis bagaimana kualitas informasi keuangan mempengaruhi kepercayaan publik, peran kualitas sistem dalam mendorong adopsi berkelanjutan, hubungan antara kepuasan pengguna.

Untuk teori ketiga yang diambil dalam penelitian ini adalah (3) *Change Management Theory*, yang dikembangkan oleh berbagai ahli termasuk Kurt Lewin dan John Kotter, memberikan pemahaman tentang bagaimana organisasi dan individu menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan yang sukses memerlukan tahapan yang

terstruktur, mulai dari pencairan (*unfreezing*) kebiasaan lama, pergerakan menuju kondisi baru (*moving*), hingga pembekuan kembali (*refreezing*) pada kebiasaan baru yang lebih baik. Dalam konteks digitalisasi sistem keuangan pemerintah, teori ini membantu memahami bagaimana resistensi terhadap perubahan dapat mempengaruhi adopsi sistem, pentingnya dukungan organisasi dalam proses transformasi digital, strategi untuk mengelola transisi dari sistem manual ke sistem digital.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan memilih 10 responden secara strategis untuk memastikan representasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Meskipun jumlah sampel relatif kecil, Dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Dengan menganalisis respons dari kelompok-kelompok yang relevan, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola penggunaan sistem, kendala yang dihadapi, serta aspek yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, meskipun sampel yang diambil kecil, kedalaman wawasan yang diperoleh tetap dapat memberikan gambaran yang cukup mengenai pengalaman pengguna secara lebih luas. Sampel terdiri dari empat kelompok utama pengguna, yaitu mahasiswa (4 orang), PNS (2 orang), karyawan swasta (2 orang), dan wirausaha (2 orang), masing-masing dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap sistem yang diteliti.

Mahasiswa dipilih karena mereka sering menggunakan sistem untuk penelitian akademis terkait keuangan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah, serta sebagai sumber data untuk tugas dan proyek penelitian mereka. Karyawan swasta dipilih karena mereka mengakses sistem untuk pelaporan pajak pribadi maupun perusahaan, mencari informasi tentang regulasi keuangan, dan memanfaatkan layanan administrasi keuangan pemerintah. Sementara itu, wirausaha menggunakan sistem untuk registrasi usaha, perizinan, pelaporan pajak, serta mencari informasi terkait program pendanaan pemerintah. Terakhir, PNS dipilih karena mereka memanfaatkan sistem untuk keperluan administrasi negara, pekerjaan, serta memperoleh informasi terkait anggaran pemerintah yang berhubungan dengan pensiun dan tugas mereka. Dengan strategi pemilihan yang tepat, penelitian ini mampu memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana berbagai kelompok pengguna berinteraksi dengan sistem.

Komposisi ini memungkinkan penelitian untuk menangkap variasi pengalaman dan persepsi antarkelompok demografis. Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, penelitian mengajukan sejumlah hipotesis kunci. Hipotesis utama menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara desain sistem informasi keuangan dengan tingkat akseptabilitas pengguna. Penelitian menduga bahwa desain antarmuka yang kompleks dan bahasa teknis yang sulit dipahami berpotensi menghambat adopsi sistem di kalangan pengguna awam. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, analisis *platform*, dan observasi langsung. Wawancara semi-terstruktur dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif responden, sementara analisis *platform* dan observasi membantu mengonfirmasi dan memperkaya temuan dari perspektif sistemik.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan lintas data. Proses analisis mencakup reduksi data, kategorisasi temuan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data dari berbagai sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Sampel yang relatif kecil (10 responden) dan sifat kualitatif metode penelitian membatasi kemampuan untuk melakukan generalisasi. Namun, kedalaman insight yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika implementasi sistem informasi keuangan di sektor publik Indonesia.

Hipotesis penelitian difokuskan pada empat dimensi utama: pengaruh desain sistem terhadap akseptabilitas, hubungan antarmuka dengan kemudahan penggunaan, perbedaan aksesibilitas antarkelompok usia, dan pengaruh kualitas informasi terhadap kepercayaan pengguna. Masing-masing hipotesis diuji melalui analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan.

Secara etis, penelitian ini menjamin kerahasiaan identitas responden dan memperoleh persetujuan informed consent dari seluruh partisipan. Objektivitas dalam pengolahan data dijaga melalui pendekatan sistematis dan transparan dalam setiap tahap penelitian. Dengan pendekatan yang berpusat pada manusia (*human-centered approach*), penelitian ini bertujuan tidak sekadar mengevaluasi sistem, tetapi juga menghasilkan rekomendasi transformatif untuk pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih inklusif, aksesibel, dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan pengguna.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah melalui pendekatan kualitatif yang komprehensif. Dengan melibatkan 10 responden dari berbagai latar belakang demografis dan profesional, penelitian bertujuan mengungkap kompleksitas implementasi dan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan sistem informasi keuangan terintegrasi. Tiga kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian ini memberikan perspektif mendalam: (1) *Technology Acceptance Model (TAM)* membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. (2) *Teori DeLone and McLean Information System Success Model* memungkinkan evaluasi kesuksesan implementasi sistem informasi dari berbagai dimensi. (3) *Change Management Theory* membantu menganalisis proses transisi organisasional dan hambatan dalam mengadopsi sistem baru. Melalui kombinasi metode wawancara, analisis *platform*, dan observasi langsung, penelitian ini berupaya memetakan lanskap penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi variasi pengetahuan, pola penggunaan, tantangan akses, dan persepsi pengguna dari berbagai kelompok sosial.

**Tabel 1. Hasil Analisis Komprehensif Pengetahuan dan Penggunaan**

<b>Kelompok Pengguna</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Rata-Rata Usia</b>	<b>Website yang Dikenal</b>	<b>Frekuensi Akses</b>
Mahasiswa	4	19,4 tahun	APBN KiTa, BPPK, OJK	Jarang (1-2 kali/bulan)
PNS	2	48,5 Tahun	BPPK, LKPP, Kementrian Keuangan	Sering (1-2 kali/minggu)
Karyawan Swasta	2	21 tahun	Pajak.go.id, BPJS	Kadang-kadang
Wirausaha	2	24,5 tahun	Pajak.go.id, BPJS	Tidak Rutin

Sumber: Hasil Analisis Wawancara Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Sektor Publik, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden mengenal beberapa website pemerintah seperti APBN KiTa, situs Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Perbendaharaan dan Keuangan Negara RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan portal BPJS. Namun, frekuensi pengaksesan relatif rendah, dengan rata-rata responden mengakses sistem informasi

hanya 1-2 kali per bulan, terutama untuk tujuan mencari informasi anggaran, perpajakan, atau kebutuhan akademis. Penelitian mendalam mengungkap kompleksitas penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah pada berbagai kelompok demografis. Analisis menunjukkan bahwa dalam variasi pengetahuan Mahasiswa yang memiliki usia rata-rata 19,4 tahun memiliki pengetahuan dasar namun akses yang jarang, PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan usia rata-rata 48,5 tahun menunjukkan pemahaman paling komprehensif, Karyawan Swasta dengan usia 21 tahun justru dengan tingkat frekuensi akses terbatas atau kadang-kadang, Wirausaha muda dengan usia rata-rata 24,5 tahun cenderung kurang tertarik dan lebih memilih sumber informasi alternatif yang lebih praktis ketimbang *platform* resmi sistem informasi keuangan Indonesia.

Berdasarkan analisis menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*, terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan sistem di antara berbagai kelompok pengguna. Dari segi persepsi kemudahan penggunaan, mahasiswa menunjukkan kesadaran yang tinggi akan keberadaan sistem, namun frekuensi penggunaannya rendah karena kendala navigasi yang rumit dan penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami. Situasi yang lebih ekstrem terlihat pada kelompok wirausaha yang hampir tidak memanfaatkan sistem sama sekali, mengindikasikan bahwa mereka memandang sistem sebagai sesuatu yang tidak relevan atau terlalu kompleks untuk digunakan dalam aktivitas mereka. Sementara itu, ditinjau dari persepsi kemanfaatan, kelompok PNS mencatatkan penggunaan sistem yang paling intensif karena adanya keterkaitan langsung dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya.

**Tabel 2. Hasil Analisis Kesulitan Pengguna dalam Mengakses Sistem Informasi**

Kelompok Pengguna	Kesulitan Utama	Tingkat Kesulitan (Skala 1-5)
Mahasiswa	Bahasa teknis, navigasi rumit	3,6
PNS	Menu kompleks, loading lambat	2,8
Karyawan Swasta	Desain ketinggalan zaman	4,2
Wirausaha	Proses administrasi berbelit	4,5

Sumber: Hasil Analisis Wawancara Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Sektor Publik, 2025

Dari perspektif pengalaman pengguna, temuan penelitian mengungkapkan beberapa hambatan utama dalam adopsi sistem. Mayoritas responden mengalami kesulitan dengan kecepatan loading halaman yang lambat, desain antarmuka yang kompleks dan tidak intuitif, bahasa teknis yang sulit dipahami oleh pengguna awam, dan navigasi yang rumit dan tidak jelas. Tabel 2 dalam hasil penelitian menunjukkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pengguna dalam mengakses Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi. Jika dikaitkan dengan *Change Management Theory*, terutama model perubahan yang dikembangkan oleh Kurt Lewin dan John Kotter, dapat terlihat bahwa proses adopsi sistem masih menghadapi tantangan pada berbagai tahap perubahan. Pada tahap *unfreezing* (mencairkan kebiasaan lama), resistensi terhadap perubahan masih tinggi, yang ditandai dengan kesulitan pengguna dalam memahami sistem. Mahasiswa mengalami kendala dalam bahasa teknis dan navigasi yang rumit, PNS merasa bahwa menu dalam sistem terlalu kompleks dengan loading yang lambat, sementara karyawan swasta menganggap desain sistem sudah ketinggalan zaman. Wirausaha menghadapi tantangan terbesar,

yakni proses administrasi yang berbelit, yang menyebabkan tingkat kesulitan tertinggi di antara kelompok pengguna.

Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik diperlukan agar pengguna lebih siap menerima sistem baru. Selanjutnya, dalam tahap *moving* (bertransisi ke perubahan baru), data menunjukkan bahwa pengguna masih mengalami kendala signifikan dalam mengadaptasi diri terhadap sistem. Skor tingkat kesulitan yang cukup tinggi (rata-rata di atas 3) menandakan bahwa sistem masih dalam tahap transisi dan belum sepenuhnya diadopsi oleh pengguna. PNS memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kelompok lain, yaitu 2,8, yang dapat mengindikasikan bahwa pengalaman organisasi dan pelatihan telah membantu mereka lebih terbiasa dengan sistem ini. Sebaliknya, mahasiswa dan karyawan swasta menunjukkan kesulitan lebih besar, yang berarti perlu ada pendekatan yang lebih ramah pengguna, seperti perbaikan tampilan antarmuka serta penyederhanaan bahasa yang digunakan dalam sistem. Pada tahap akhir, *refreezing* (membekukan perubahan agar berlangsung permanen), diperlukan upaya yang lebih strategis agar sistem dapat diterima secara luas dan digunakan secara berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain penyederhanaan navigasi sistem, peningkatan kecepatan loading, serta reformasi proses administrasi agar lebih efisien. Jika perubahan ini diimplementasikan dengan baik, resistensi pengguna dapat berkurang, dan sistem akan lebih mudah diterima oleh publik.

**Tabel 3. Tingkat Kepercayaan terhadap Informasi Pemerintah**

Kelompok Pengguna	Tingkat Kepercayaan (%)	Alasan Utama
Mahasiswa	85%	Sumber resmi, Untuk kepentingan akademis
PNS	95%	Pengalaman interal
Karyawan Swasta	75%	Kebutuhan praktis
Wirausaha	70%	Mencari informasi spesifik

Sumber: Hasil Analisis Wawancara Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Sektor Publik, 2025

Temuan kunci tentang kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi keuangan pemerintah yang ditunjukkan pada tabel 3 menunjukkan suatu fenomena kompleks yang memerlukan perhatian menyeluruh. Meskipun mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap sumber informasi resmi, namun terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu ditangani. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan serangkaian strategi transformatif yang tidak hanya berfokus pada teknologi, melainkan juga pada pengalaman pengguna yang inklusif. Pertama-tama, transformasi digital menjadi langkah krusial dalam menghadapi kompleksitas sistem yang ada. Dengan merancang antarmuka yang modern dan intuitif, serta menyederhanakan bahasa teknis, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pemahaman antarkelompok pengguna. Selain itu, pendekatan aksesibilitas inklusif menjadi prasyarat penting, di mana sistem harus responsif terhadap beragam kebutuhan pengguna, mulai dari penyediaan versi mobile hingga pengaturan ukuran font yang fleksibel.

Berdasarkan teori *DeLone and McLean*, penelitian mengidentifikasi tiga dimensi kunci dalam kualitas sistem: Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Layanan. Sementara

informasi yang disajikan dinilai kredibel, namun kompleksitas bahasanya masih menjadi hambatan signifikan. Dengan demikian, edukasi digital menjadi komponen strategis untuk mentransformasi sistem, yang mencakup sosialisasi di tingkat sekolah, program pelatihan untuk kelompok usia lanjut, serta penggunaan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Dari perspektif *Change Management Theory*, penelitian mengungkap beberapa faktor kritis yang menghambat adopsi sistem. Resistensi pengguna akibat kompleksitas, kurangnya sosialisasi, kesenjangan digital antarkelompok usia, dan desain yang tidak mempertimbangkan keberagaman kebutuhan menjadi titik-titik kritis yang perlu diintervensi.

Untuk itu, Dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem informasi keuangan terintegrasi, beberapa solusi strategis telah diidentifikasi. Pertama, penyederhanaan laman sistem dengan membuat desain yang lebih intuitif dan navigasi yang lebih mudah menjadi prioritas utama. Hal ini diikuti dengan peningkatan aksesibilitas melalui optimalisasi kecepatan sistem dan penyediaan versi *mobile*. Untuk memastikan penggunaan yang optimal, sosialisasi mengenai edukasi digital serta panduan sederhana bagi pengguna akan dilaksanakan secara sistematis. Selain itu, reformasi proses administrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang menghambat akses pengguna. Solusi yang ditawarkan memiliki beberapa keunggulan signifikan. Pendekatan yang *user friendly* akan memudahkan semua kalangan dalam mengakses sistem. Sistem yang cepat dan responsif dengan loading lebih cepat dan dapat diakses di perangkat mobile akan meningkatkan efisiensi penggunaan.

Aksesibilitas tinggi memastikan sistem dapat menjangkau pengguna dari berbagai latar belakang. Yang tidak kalah penting, efisiensi administrasi akan mempermudah proses keuangan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Sebagai implementasi dari solusi tersebut, sebuah prototipe ide berupa "Portal & Aplikasi Keuangan Publik" telah dirancang dengan beberapa fitur utama. Tampilan antarmuka dibuat lebih sederhana dengan navigasi yang jelas dan tampilan modern. Sistem dilengkapi dengan notifikasi otomatis untuk pengingat pembayaran pajak atau subsidi. Untuk membantu pengguna, chatbot *AI* disediakan sebagai panduan, dan aksesibilitas tinggi dijamin melalui mode *mobile-friendly*.

Dalam pengembangan dan implementasi sistem ini, berbagai pihak terlibat secara aktif. Pemerintah dan regulator, termasuk Kementerian Keuangan, OJK, dan BPKP, berperan sebagai pengambil kebijakan dan pengawas. Developer IT bertanggung jawab sebagai pengembang *software* dan *desainer UI/UX*. Akademisi dan peneliti berkontribusi dalam analisis sistem dan efektivitas penggunaan. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha berperan sebagai pengguna sistem dan penerima manfaat utama. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan penerimaan sistem oleh berbagai kelompok pengguna melalui solusi teknologi yang inklusif dan inovatif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan kebutuhan pengguna, diharapkan sistem informasi keuangan terintegrasi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi di sektor publik, dengan fokus pada efektivitas sistem, adaptasi pengguna, dan tantangan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara pengguna, analisis platform dan observasi pengguna untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi sistem dan pengalaman pengguna. Hasil penelitian mengungkapkan adanya variasi signifikan dalam tingkat pengetahuan dan penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah di kalangan responden. Kelompok pengguna seperti mahasiswa, PNS, karyawan

swasta, dan wirausaha menunjukkan pola penggunaan yang berbeda-beda, dengan kendala utama berupa bahasa teknis yang sulit, antarmuka yang kompleks, serta proses administrasi yang berbelit.

Analisis berdasarkan teori TAM, DeLone and McLean, serta Change Management Theory mengidentifikasi beberapa isu kritis yang perlu ditangani, seperti persepsi kemudahan penggunaan yang rendah, resistensi pengguna akibat kompleksitas sistem, serta kesenjangan digital antarkelompok. Meskipun mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sumber informasi resmi pemerintah, terdapat sejumlah tantangan signifikan terkait kualitas, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna yang harus dihadapi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi transformatif yang tidak hanya berbasis teknologi, namun juga memprioritaskan pengalaman pengguna yang inklusif.

Solusi yang ditawarkan mencakup penyederhanaan laman sistem dengan desain yang lebih intuitif dan navigasi yang lebih mudah, peningkatan aksesibilitas melalui optimalisasi kecepatan sistem dan penyediaan versi *mobile*, serta reformasi proses administrasi untuk mengurangi birokrasi yang menghambat. Implementasi solusi ini diwujudkan dalam bentuk sistem yang dilengkapi fitur-fitur inovatif seperti notifikasi otomatis untuk pengingat pembayaran, chatbot AI untuk panduan pengguna, dan antarmuka yang *mobile-friendly*. Keberhasilan implementasi sistem ini membutuhkan kolaborasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan regulator (Kementerian Keuangan, OJK, BPKP), developer IT, akademisi dan peneliti, serta masyarakat dan pelaku usaha sebagai pengguna akhir. Dengan pendekatan yang berpusat pada manusia dan solusi teknologi yang inklusif dan inovatif, penelitian ini berkontribusi pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Oktrivina D. Sirregar, I. M. (2020, April). ANALISIS KERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA DEPOK-JAWA BARAT). *Journal IMAGE*, 9(1). From <https://ejournal.upi.edu/index.php/image/article/view/23998>
- Baity Nu Fadila, D. A. (2024). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi Untuk Peningkatan Efisiensi Keuangan. *Musyari : Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi*, 3(1). doi:<https://doi.org/10.8734/musyari.v3i1.1558>
- Fadilla, N. (2020, Juni). Kesenjangan Digital di Era Revolusi Industri 4.0 dan Hubungannya dengan Perpustakaan sebagai Penyedia Informasi. *LIBRIA*, 12(1). From <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/view/7674>
- Hajizah, A. (2024, January). Penerapan User Experience Dalam Permodelan Sistem Informasi Keuangan. *Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science (ITSECS)*, 2(1). From <https://ejournal.techcart-press.com/index.php/itsecs/article/view/88>
- Humairah Almahdali, E. Q. (2024). *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*. (R. Persada, Ed.) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia: Penerbit Tri Edukasi Ilmiah. From [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IJ41EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=reformasi+birokrasi+digital&ots=EQILOvHAAV&sig=mwPMsKwiFhr-bVXF1a2DKy0lu7s&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IJ41EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=reformasi+birokrasi+digital&ots=EQILOvHAAV&sig=mwPMsKwiFhr-bVXF1a2DKy0lu7s&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, September 20). *Indonesia Naik 13 Peringkat pada UN E-Goverment Survey 2024, Menteri PANRB: Kolaborasi Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah melalui SPBE*. From PANRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-13-peringkat-pada-un-e-governmentsurvey-2024-menteri-panrb-kolaborasi-akselerasi-transformasi->

**Prosiding Paper Competition Accounting Festival, Volume xxx. Nomor xx. Bulan Tahun.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan**

- digital-pemerintah-melalui-spbe  
Mekari Jurnal. (2022, Januari 6). *Pentingnya Sistem Terintegrasi untuk Akuntansi Perusahaan*. From Mekari Jurnal: <https://www.jurnal.id/id/blog/pentingnya-sistem-terintegrasi-untuk-akuntansi-perusahaan/>
- Michael A. Hitta, J.-L. A. (2021, Januari). Strategic Management Theory in a Post-Pandemic and Non-Ergodic World. *Journal of Management Studies*, 58(1). doi:10.1111/joms.12646
- Ria Jayanthi, A. D. (2022, December). The Digital Gap and Solutions Implemented in Indonesia during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)*, 24(2). From <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/4859>
- Santika, E. F. (2024, 4 12). *Tingkat Penetrasi Internet Indonesia Capai 79,5% per 2024*. From databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/e6f9d69e252de32/tingkat-penetrasi-internet-indonesia-capai-795-per-2024>
- Sharma, S. B. (2021). Green Financing in India: Identifying Future Scope for Innovation in Financial System. *Green Economics*, 15(3). From <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJGE.2021.120875>
- Siti Irafah, E. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 8(2). From [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/88761673/349536755-libre.pdf?1658245623=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh\\_Kompetensi\\_Sumber\\_Daya\\_Manusia.pdf&Expires=1739456027&Signature=ACq2FfiJPCo-qGU2eS03hev0TLa9c7M9kpEucwUTQa5ts2MLO2djH](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/88761673/349536755-libre.pdf?1658245623=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengaruh_Kompetensi_Sumber_Daya_Manusia.pdf&Expires=1739456027&Signature=ACq2FfiJPCo-qGU2eS03hev0TLa9c7M9kpEucwUTQa5ts2MLO2djH)
- Siti Mutmainnah, W. N. (2023). Determinan Tingkat Transparansi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5. From <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/27579>
- Supriyanto, B. E. (2024, Agustus 31). *Integrasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dengan Manajemen Risiko Keuangan*. From Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Penbendaharaan: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3726-peningkatan-kesadaran-keamanan-informasi-kepada-pegawai-kppn-watampone.html>
- Tutut Dwi Prihatin, A. H. (2023, Desember). Evaluasi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model. *KLIL: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4(3). doi:DOI 10.30865/klik.v4i3.1420
- Tutut Widyaningrum, Q. S. (2024). The Delone and McLean Information System Success Model: Investigating User Satisfaction in Learning Management System. *Journal of Education Technology*, 8(1). doi:<https://doi.org/10.23887/jet.v8i1.71080>
- Untung Subagyo, A. B. (2023, Mei). Prototype Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan. *Journal Automation Computer Information System*, 1(1). doi:<https://doi.org/10.47134/jacis.v3i1.55>